FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA KENDARI (STUDI KASUS PASAR SENTRAL KOTA KENDARI)

¹Abdul Kadir, ²Taufik, ³Rahayu

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
habdulkadir64@yahoo.com

Kota Kendari, Kode pos : 93232, Indonesia

Abstract

This study aims to determine and describe the function of controlling the circulation of prohibited cosmetics at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Kendari City (Central Market Case Study of Kendari City). conclusions/verification. The results showed that Drugs and Food (BPOM) Kendari City in terms of carrying out activities carried out according to previously established standards have been carried out properly, namely carrying out intensification or inspections to places where there are indications that there are prohibited cosmetics containing ingredients. And the aspect of carrying out monitoring is not optimal because some people who are still unfamiliar with gadgets or applications cannot use BPOM Mobile, this application can be used before buying cosmetics so that they are not only tempted by instant results but also pay attention to whether the cosmetics are safe or not. Has been carried out properly, supervision through print media and social media to educate the public about choosing cosmetic products that are safe and free of prohibited substances. In terms of taking corrective actions if they get deviations from obstacles, they are not optimal, because there are still some people who are less cooperative if they know of cosmetics containing prohibited substances.

Keywords: Cosmetic Circulation; Supervision Function

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kendari (Studi Kasus Pasar Sentral Kota Kendari). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kendari dari segi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik, yakni melakukan intensifikasi atau sidak ke tempat yang terindikasi ada menjual kosmetik berbahan terlarang. Dari segi melaksanakan monitoring belum optimal sebab beberapa masyarakat yang masih awam terhadap gadget atau aplikasi tidak dapat menggunakan BPOM Mobile, aplikasi ini dapat digunakan sebelum membeli kosmetik agar tidak hanya tergiur hasil instan melainkan juga perhatikan aman atau tidak kosmetik tersebut. Dari segi perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar yang ditentukan telah dilaksanakan dengan baik, pengawasan melalui media cetak maupun sosialmedia untuk mengedukasi masyarakat tentang memilih produk kosmetik aman serta bebas bahan terlarang. Dari segi melakukan tindakan koreksi jika mendapatkan penyimpangan/hambatan belum optimal, sebab masih ada beberapa masyarakat yang kurang kooperatif jika mengetahui adanya kosmetik berbahan terlarang.

Kata Kunci: Prinsip Transparansi; Pelayanan Prima

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar. tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Provinsi Sultra, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat, khususnya Kota Kendari. Pertumbuhan penduduk yang pesat itu mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Khususnya produk kosmetik yang sudah dijadikan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat yang tidak digunakan oleh kaum wanita saja, namun kaum pria pun sudah mengonsumsinya dengan alasan untuk menjaga dan mempertahankan penampilan maskulinnya. Banyaknya produk kosmetik yang beredar khususnya di pasar-pasar tradisional. Biasanya pria dan wanita cenderung lebih memilih produk yang murah dan memberikan hasil yang memuaskan dalam waktu yang singkat. Hanya memikirkan hasil yang singkat tanpa memperhatikan kandungan kosmetik itu sendiri apakah aman atau tidak.

Kosmetik menjadi penunjang penampilan seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat produsen kosmetik mampu memproduksi produk kosmetiknya dengan jumlah banyak dan variasi yang berbeda-beda. Hal tersebut didorong oleh tingginya permintaan akan kosmetik. Meningkatnya permintaan akan kosmetik membuat produsen berlomba-lomba untuk membuat dan menjual kosmetik tanpa memperhatikan kandungan yang terdapat didalamnya.

Bahkan pada zaman sekarang banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Olehnya itu, pentingnya pengawasan bagi masyarakat dan kelancaran suatu program atau kebijakan. Salah satunya pengawasan terhadap kosmetik yang beredar di pasaran. Agar terhindar dari penyelewengan terhadap kosmetik tersebut dan berdampak merugikan bagi konsumen maka pengawasan yang dilakukan lembaga terkaitlah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang notabenenya merupakan konsumen juga.

Maka dari itu melalui pertimbangan, bahwa pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung

penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas dan fungsi BPOM diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan bahwa :

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psitoprika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Perpres ini menegaskan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan,". Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang di tujukan Independensi nya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kendari merupakan unit kerja dari BPOM RI untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang berada di ruang lingkup Kota Kendari. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Sultra terdiri dari dua bagian penting yaitu: (1) Pengawasan Pre Market (Pemeriksaan sarana dalam rangka izin produksi dan pemeriksaan sarana dalam rangka izin edar produk). (2) Pengawasan Post Market (Pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, sampling produk, pengawasan iklan, pengawasan penandaan atau label.

Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin yang mengandung zat berbahaya di pasaran membuat sebagian masyarakat resah. Produk kosmetik yang ilegal akan menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat selaku konsumen kosmetik tersebut. Maka dari itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah agar tidak ada masyarakat menjadi korban zat berbahaya dari kosmetik tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari (BPOM Kendari) memiliki tugas yang sangat penting dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan peredaran obat dan makanan. Salah satunya pengawasan terhadap produk kosmetik yang mesti berkualitas dan aman bagi masyarakat. Pengawasan tersebut harus dilakukan dengan baik dan teliti serta lebih mengedepankan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Dilansir lenterasultra.com 29 Desember 2020, Kepala BPOM Kendari Muhammad Rusydi Ridha,S.Farm.,Apt menyampaikan, pada tahun 2020 kebanyakan ditemukan pelanggaran persedaran di bidang kosmetik. Dari 33 kasus yang dilakukan penyelidikan empat diantaranya telah dilakukan penyidikan dan akan dilanjutkan ke ranah hukum. Sementara kosmetik yang beredar yang berhasil diamankan tersebut dengan nilai ekonomis sebesar Rp.79,8 juta. Ia juga berharap kepada rekan-rekan media,masyarakat umum dan seluruh stakeholder untuk bekerja sama mencegah peredaran kosmetik secara ilegal karena berbahaya bagi kesehatan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah salah satu cara atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti , penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi (Moleong, 2007 : 90), yang bertindak sebagai informan/responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 9 orang .Dari segi teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara mendalam , dokumentasi dan observasi, kemudian menganalisis data yang terkumpul menggunakan teknik analisis interactive model menurut Milles & Huberman dalam (Sugiono, 2016), meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kendari

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai konsepsi teoritis yang menjadi rujukan bahwa pengawasan menjadi suatu kegiatan yang difokuskan oleh pemerintah maupun swasta karena pengawasan menjadi lebih penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan juga merupakan proses evaluasi untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Maka sejalan dengan hal itu penelitian ini, untuk mendeskripsikan fungsi pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahan terlarang pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang menjadi konteks fokus perhatian, peneliti membatasi ruang lingkup agar pembahasan tidak melebar. Batasan penelitian ini sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi keracunan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek penelitian terfokus pada 4 indikator fungsi pengawasan seperti yang tercantum dalam kerangka pikir, yaitu indikator : Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan, Memonitor pelaksanaannya, Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan, Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan. Berikut penulis deskripsikan/analisis penjelasan tentang dimensi-dimensi tersebut berdasarkan data, temuan dan fakta di lapangan.

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan

Menetapkan tujuan organisasi adalah menjalankan segala kegiatan organisasi termasuk didalamnya pengawasan haruslah sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi. Maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan demi mencegah peredaran kosmetik berbahan terlarang yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen kosmetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan standar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dilakukan pengawasan rutin berdasarkan *public warning* yang dikeluarkan BPOM dan juga terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya produk kosmetik berbahan terlarang yang beredar maka pihak BPOM akan turun ke lapangan atau intensifikasi untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik tersebut, BPOM tidak sendiri

melainkan juga melibatkan *stakeholder* lain yakni kepolisian dan dinas kesehatan . Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik berbahan terlarang yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

B POM Kota Kendari mengeluarkan *public warning* yang merupakan peringatan untuk publik mengenai produk-produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang dan berbahaya. *Public warning* diterbitkan dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermanfaat dan tidak bermutu. Sesuai dengan tabel diatas terdapat 39 produk yang mengandung bahan terlarang dan membahayakan kesehatan masyarakat jika menggunakannya. Dari 39 produk kosmetik tersebut, terdiri dari 2 produk lipstick, 2 produk sabun wajah, 2 produk serum wajah, 1 produk sunscreen, dan 32 krim wajah.

Sebelum melakukan intensifikasi yakni pengawasan turun langsung ke lapangan, terdapat pelatihan yang dilakukan oleh pihak B POM agar pengawasan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan organisasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahan terlarang yang dilakukan oleh B POM Kendari telah menerapkan standar pelaksanaan kegiatannya dengan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan organisasi, salah satunya dengan memberikan pengetahuan bagaimana kosmetik yang aman digunakan. Dengan memperhatikan nama produknya, komposisinya jelas, tercantum alamat lengkap pabrik, cara pemakaian serta ada peringatan untuk sediaan-sediaan yang bisa menimbulkan iritasi. Dalam melakukan pengawasan , pihak B POM Kendari tak henti-hentinya menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik berbahan terlarang disertakan edukasi akan dampak yang didapatkan jika menggunakan produk terlarang tersebut.

Kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh pihak B POM Kendari, salah satunya adalah dipasar-pasar tradisional yang ada di Kendari. Peneliti melakukan studi kasus di Pasar Sentral Kota Kendari, menanyakan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan B POM terhadap kosmetik terlarang. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan B POM terhadap pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang membuahkan hasil. Melalui intensifikasi atau sidak dan himbauan akan dampak jika tetap menjual kosmetik terlarang tersebut juga yang membuat pedagang takut akan hal itu, salah satunya Pasar Sentral Kendari itu sangat berpengaruh bagi pedagang. Karena rutinnya dilaksanakan sidak, pedagang yang menjual kosmetik berbahan terlarang sudah tidak lagi menjual kosmetik tersebut. Berarti ada kesadaran dalam diri penjual tersebut, sehingga memudahkan B POM melakukan pengawasan kosmetik berbahan terlarang. Masyarakat dapat diajak kerja sama.

2. Memonitor pelaksanaannya

Memonitor pelaksanaannya yaitu mengamati secara seksama kegiatan yang dilakukan agar informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat dijadikan landasan serta evaluasi dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Terdapat program yang telah disusun sebelumnya kemudian program tersebut dijalankan oleh pegawai. Dalam menjalankan program tersebut dilakukan pengamatan secara seksama, kemudian dijadikan evaluasi agar dapat diketahui langkah yang dapat diambil selanjutnya dan jika terdapat kendala didalamnya dapat dilakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung monitoring pelaksanaan BPOM Kendari telah menyediakan program berupa aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di gadgetnya masing-masing. Aplikasi tersebut yakni BPOM Mobile, dalam aplikasi tersebut kita dapat mengetahui apakah kosmetik yang kita beli terdaftar BPOM atau tidak. Cara mengecek produk kosmetik adalah dengan memasukkan merk kosmetik/scan barcode dengan begitu detail mengenai kosmetik tersebut akan muncul. Dan juga BPOM melakukan *sampling* produk dipasar kemudian dilakukan uji lab. Saat telah keluar hasil lab kosmetik tersebut maka dilakukan evaluasi pada kosmetik tersebut dengan melihat izin edarnya, cara pakai (*how to use*), *claimnya* tidak berlebihan, alamat produksi lengkap dan disertakan barcode untuk kosmetik yang diproduksi 2018 keatas. Sebab jika tidak ada *barcode* maka tidak memenuhi ketentuan penandaan. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan yakni pusat menyurati industri kosmetik tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPOM terkait kosmetik berbahaya terlarang belum optimal sebab masih ada beberapa orang yang mencari produk kosmetik terlarang. Kosmetik berbahaya terlarang memberikan hasil yang instan, klaimnya yang dapat memberikan hasil maksimal dalam kurun waktu singkat. Hal tersebut menjadi daya tarik, karena kebanyakan wanita menginginkan kulit putih dalam waktu singkat. Kemudian BPOM melakukan *sampling* kemudian uji lab, yang mana dilakukan untuk mengetahui kandungan kosmetik apakah mengandung bahan terlarang atau tidak. Jika terbukti kosmetik tersebut mengandung bahan terlarang, maka atas usulan BPOM pusat akan menyurati tempat produksi kosmetik tersebut dan jika berada dipasaran maka akan dilakukan penyitaan.

3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan

Dimensi selanjutnya untuk menjelaskan fungsi pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya terlarang pada BPOM Kota Kendari peneliti juga meninjau dari membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan adalah mencocokkan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau

tidak. Kegiatan yang telah disusun kemudian dilaksanakan oleh pegawai dan dicocokkan hasil kerjanya dengan standar kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap kosmetik berbahan terlarang dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui teknik sampling kemudian dilanjutkan uji laboratorium serta evaluasi penandaan, pengawasan iklan kosmetik melalui berbagai media yakni diantaranya iklan di televisi, majalah, koran, banner, brosur kosmetik dan sosial media yang saat ini hampir seluruh kalangan mengaksesnya sehingga memudahkan BPOM Kota Kendari untuk mensosialisasikan bahayanya penggunaan kosmetik berbahan terlarang. Kemudian pengawasan melalui intensifikasi berdasar *public warning* yang dikeluarkan BPOM terkait kosmetik terlarang dan juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Semua hal yang tersebut, dilakukan sebagai cara BPOM Kota Kendari untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahan terlarang, yang tentunya dapat merugikan masyarakat.

Pihak BPOM telah berhasil menjalankan kegiatan pengawasan, salah satunya melalui media sosial media instagram dapat mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan sembarang kosmetik terutama yang mengandung bahan terlarang. Sehingga masyarakat menggunakan kosmetik sesuai dengan kebutuhan kulitnya saja. Yang tentunya hasil maksimal pada kulit tidak didapat secara instan melainkan butuh proses, karena hasil yang ditawarkan oleh kosmetik berbahan terlarang itu cepat tetapi dampak buruknya berkepanjangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari melalui website, didalamnya terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh masyarakat yakni informasi terkait produk pangan, obat dan kosmetik yang telah lulus tes uji lab BPOM Kendari, masyarakat juga dapat mengecek produk yang telah lolos BPOM, dan masyarakat dapat juga melakukan pengaduan pada website tersebut.

bahwa perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar yang ditentukan telah berjalan lancar dan menghasilkan dampak yang baik. Yakni pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari baik melalui berbagai media sosial maupun media cetak mengenai kosmetik terlarang berhasil mengedukasi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih paham bagaimana memilih kosmetik yang aman untuk kulit, tidak hanya memberi efek cerah melainkan juga menyehatkan dan tentunya sesuai kebutuhan kulit masing-masing.

4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan

Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan adalah diperlukan adanya perbaikan atau solusi bilamana terjadi penyimpangan terhadap kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan suatu kegiatan terkadang sedikit banyaknya timbul penyimpangan, tetapi tentunya hal itu dapat ditangani

karena saat menyusun suatu kegiatan atau program telah disiapkan sebuah solusi demi mengantisipasi kemungkinan buruknya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai POM Kendari melakukan tindakan koreksi jika mendapatkan penyimpangan/hambatan dalam melakukan pengawasan kosmetik berbahan terlarang ini belum optimal. Sebab masih ada beberapa masyarakat yang kurang kooperatif jika mengetahui adanya kosmetik berbahan terlarang. Mereka tidak langsung melakukan pengaduan mengenai keberadaan kosmetik tersebut. Melainkan menunggu dulu efek buruk dari kosmetik tersebut baru kemudian melakukan pengaduan. Pihak BPOM Kota Kendari selalu serta tak bosan menghimbau dan mengingatkan bahayanya penggunaan kosmetik berbahan terlarang jika tetap nekat ingin menggunakannya. Tetapi masih ada juga masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik berbahan terlarang. Disamping BPOM memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebelum membeli produk kosmetik harus cek kemasan, label, iklan dan tanggal kadaluwarsa. Balai POM Kendari juga harus memberikan sanksi tegas kepada pedagang kosmetik terlarang agar tidak lagi menjualnya. Serta melakukan penyitaan terhadap kosmetik berbahan terlarang tersebut. Itu dilakukan agar tidak banyak masyarakat menjadi korban, merugikan baik dari segi biaya maupun kesehatan kulit.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahan terlarang pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari telah diselenggarakan dengan baik. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan intensifikasi rutin yang dilakukan berdasarkan pengawasan tahun lalu dimana BPOM mengeluarkan *public warning* terkait kosmetik berbahan terlarang dan juga berdasar laporan dari masyarakat. BPOM Kota Kendari selalu menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk tidak tergiur kosmetik dengan hasil instan karena kosmetik yang baik butuh proses untuk dapat kita lihat hasilnya pada kulit.

Melalui aplikasi BPOM Mobile dapat membantu pengawasan karena dengan aplikasi itu masyarakat dapat mengecek sendiri kosmetik yang mereka beli apakah terdaftar BPOM atau tidak sehingga masyarakat juga dapat menjadi pembeli kosmetik yang cerdas, tidak sembarang membeli kosmetik yang mengandung bahan terlarang. Namun perlu dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan BPOM Mobile agar sebelum membeli produk kosmetik yang diinginkan dapat terlebih dahulu mengeceknya di BPOM Mobile. Dari segi perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar yang ditentukan telah berjalan baik, pengawasan melalui media cetak maupun sosial media untuk mengedukasi masyarakat tentang memilih produk kosmetik aman serta bebas bahan terlarang. Dari aspek melakukan tindakan koreksi jika mendapatkan penyimpangan/hambatan belum optimal,

sebab masih ada beberapa masyarakat yang kurang kooperatif jika mengetahui adanya kosmetik berbahan terlarang.

REFERENSI

- Earl P. Strong. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta,
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan*. CV Alfabeta. Bandung
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Pustaka Quantum. Jakarta
- Heidjarachman Ranupandojo, dan Suad Husnan, 1990, *Manajemen Personal*, Yogyakarta: BPFE
- Jufrizen, J. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 17(2), 181–195.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.00.05.4.1.1745 tentang kosmetik.
- M Manulang dan Marihot AMH Manulang. 2004. *Manajemen Personal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Saydam, G. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management) Suatu Pendekatan Mikro*. Cetakan Kedua. Djembatan. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014 *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.